



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT
PANJA MINERAL DAN BATUBARA (PKP2B, KP DAN IUP)
KOMISI VII DPR-RI DENGAN DIRJEN MINERBA KEMENTERIAN ESDM RI**

Tahun Sidang : 2013 - 2014
Masa Persidangan : IV
Jenis Rapat : RDP Panja Mineral dan Batubara (PKP2B, KP dan IUP)
Dengan : Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI
Sifat Rapat : Tertutup
Hari, Tanggal : Kamis, 12 Juni 2014
Pukul : 10.00 s.d 13.35 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi VII DPR-RI
Ketua : Ir. S. Milton Pakpahan, MM
Sekretaris : H. Rofi Munawar, Lc
Hadir Anggota : 20 orang dari 26 Anggota Panja
: orang izin
Acara : Pembahasan tentang Progres Perkembangan CNC
diseluruh Kabupaten se-Indonesia, Renegoisasi PKP2B
dan Kontrak Karya (KK) serta pelaksanaan kebijakan
terkait Pembangunan Smelter.
Pokok Bahasan : Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Panja Minerba Komisi VII DPR RI dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI pada Hari Kamis, Tanggal 12 Juni 2014, dibuka pukul 11.45 WIB yang dipimpin oleh Ketua Panja Mineral dan Batubara (PKP2B, KP dan IUP) Komisi VII DPR RI Ir. S. Milton Pakpahan, MM dan dinyatakan tertutup untuk umum.
2. Ketua Rapat Panja Mineral dan Batubara (PKP2B, KP dan IUP) Komisi VII DPR RI menyatakan Rapat Dengar Pendapat Panja Mineral dan Batubara (PKP2B, KP dan IUP) Komisi VII DPR RI dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI terkait Pembahasan tentang Progres Perkembangan CNC diseluruh Kabupaten se-Indonesia, Renegoisasi PKP2B dan Kontrak Karya (KK) serta pelaksanaan kebijakan terkait Pembangunan Smelter.

II. KESIMPULAN

1. Panja Minerba Komisi VII DPR RI mendesak kepada Dirjen Minerba untuk menyampaikan *progress report* 6 (enam) isu strategis renegoisasi yang sudah disetujui atas 40 perusahaan KK dan PKP2B yang sudah sepakat seluruhnya dan 67 perusahaan KK dan PKP2B yang sudah sepakat sebagian atas seluruh isu strategis renegoisasi.

Myp

2. Panja Minerba Komisi VII DPR RI mendesak kepada Dirjen Minerba untuk melaporkan dana jaminan reklamasi dan pasca tambang, program pengembangan masyarakat/CSR, rencana penutupan tambang, dan pengelolaan lingkungan perusahaan KK dan PKP2B serta melaporkan hasil koordinasi supervisi penataan IUP dengan pemerintah daerah kepada Komisi VII DPR RI paling lambat tanggal 23 Juni 2014.
3. Panja Minerba Komisi VII DPR RI mendesak kepada Dirjen Minerba untuk menyampaikan laporan hasil evaluasi pembangunan smelter untuk disampaikan kepada Komisi VII DPR RI paling lambat tanggal 23 Juni 2014.

III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 13.35 WIB.

JAKARTA, 12 JUNI 2014
KETUA PANJA,



IR. S. MILTON PAKPAHAN, MM